

Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan Diawasi KPK



Sumber gambar: Tribun Kaltim Senin, 07/04/2025

Komisi III Temukan Kerusakan di Bagian Plafon

BALIKPAPAN, TRIBUN - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri memastikan bahwa pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan kini siap memasuki tahap ketiga. Proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu disebut berjalan sesuai rencana. Meskipun sebelumnya sempat ditemukan sejumlah kejanggalan oleh Komisi III DPRD saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

“Komisi III kemarin melakukan Sidak dan memang ini sudah tahap kedua. Saat ini, tahap kedua akan segera memasuki tahap ketiga yang meliputi pekerjaan interior,” kata Alwi kepada awak media, Sabtu (5/4).

Dalam Sidak tersebut, Komisi III menemukan sejumlah persoalan teknis yang cukup memprihatinkan. Di antaranya, plafon yang baru terpasang sudah mengalami kerusakan, serta pemasangan instalasi listrik, dan kaca yang tidak sesuai standar. Bahkan, kualitas gypsum juga dinilai buruk. Sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna gedung di masa depan.

Meski begitu, Alwi menegaskan bahwa proyek ini berada dalam pengawasan penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan dilakukan sejak tahap awal perencanaan, proses tender, hingga evaluasi rutin setiap bulan. “KPK memberikan pendampingan penuh. Bahkan, ada rekomendasi langsung dari KPK terkait pengerjaan proyek ini. Tapi perlu ditegaskan, peran KPK hanya sebagai pendamping, bukan mengambil alih penuh jalannya proyek,” jelasnya.

Adapun pengerjaan tahap kedua dari proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp36 miliar. Meskipun ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, proyek ini belum rampung tepat waktu. Karena itu, kontraktor diberi masa perpanjangan selama 50 hari dengan dikenakan denda 1/1.000 dari nilai kontrak per hari keterlambatan.

Saat ini, progres tahap kedua telah mencapai lebih dari 99 persen dan tinggal menyelesaikan sisa pekerjaan minor dalam masa perpanjangan waktu tersebut.

Setelah seluruh pekerjaan tahap kedua dirampungkan, pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan akan langsung berlanjut ke tahap ketiga, yang mencakup penyelesaian seluruh pekerjaan interior. Dia berharap, gedung baru tersebut nantinya dapat digunakan

secara optimal, dan memenuhi standar keselamatan, serta kenyamanan kerja para anggota dewan. (znl)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan Diawasi KPK, 07/04/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri Tegaskan Proyek Pembangunan Gedung DPRD dalam Pengawasan KPK, 05/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002), komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. Diatur dalam Pasal 6 UU 30/2002 bahwa komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Dalam Pasal 13 UU 30/2002 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, komisi pemberantasan korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :
 - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
 - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.